

KEBIJAKAN MADRASAH ALIYAH PROGRAM KHUSUS (MAPK)

Lalu Khtohibul Umam¹

¹Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu, Lombok Tengah, NTB

¹umamaddakhil@gmail.com

ABSTRACT: *Madrasahs are the oldest and longest existing educational institutions in Indonesia, these institutions exist after the establishment of Islamic boarding schools, usually to distinguish between modern and classical madrasahs or salafi is the establishment of a madrasah in the pesantren, as well as the pattern existing in the Islamic boarding school has been adopted into a special madrasa, then the Special Madrasah Aliyah program or commonly abbreviated as MAPK was formed, this program was born to create a generation that is qualified both in the field of religion such as proficient in the study of classical books, as well as in the general field such as English and other fields.*

ABSTRAK: *Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang paling tertua, dan terlama telah ada di Indonesia, lembaga tersebut ada setelah berdirinya pondok pesantren, biasanya untuk membedakan antara madrasah modern dengan klasik atau salafi adalah berdirinya sebuah madrasah yang ada di pondok pesantren tersebut, demikian juga halnya dengan pola yang ada di pondok pesantren telah di adopsi menjadi madrasah khusus, maka terbentuklah Madrasah Aliyah program Khusus atau biasa disingkat dengan MAPK, program ini lahir untuk menciptakan generasi yang mumpuni baik di bidang agama seperti mahir dalam kajian kitab-kitab klasik, maupun mumpuni di bidang umum seperti bahasa Inggris dan bidang-bidang lainnya.*

Kata Kunci: *Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus; Sejarahnya; Pengembangannya.*

A. LATAR BELAKANG

Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan yang awal berdirinya merupakan pendidikan yang nonformal, kelahirannya mampu merubah tatanan pendidikan yang ada di Indonesia pada saat awal kelahirannya dan pada masa yang akan datang, kebijakan-kebijakan pendidikan di madrasah pada awal kelahirannya terbebas dari intervensi dari luar struktur lembaga manapun termasuk lembaga pemerintahan, Masalah pengakuan, kesetaraan baik secara kualitas maupun dari segi kelembagaan, serta tantangan perbaikan mutu terus menerus menjadikan madrasah mencari bentuk dan format yang yang tepat dan terbaik untuk pengembangan kelembagaan bagi salah satu lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia ini, Perjuangan dan persaingan yang secara kontinyu menjadikan lembaga ini untuk masa sekarang dan yang akan sudah tidak dianggap sebagai lembaga pendidikan yang dianak tirikan.(Andriani 2016). Oleh karena itu untuk memajukan lembaga ini harus pengembangannya dilakukan secara utuh dan konsisten terutama dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan yang menekankan pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusianya (SDM).

Selama proses penyelarasan antara madrasah dan sekolah umum, muncul Keputusan Bersama Menteri (SKB) 3.menteri pada no 6 tahun 1975 dan no 037/U/1975. (Dute 2019) antara kepala agama, direktur pendidikan dan kebudayaan, dan direktur urusan dalam negeri, tentang peningkatan kualitas pengajaran di madrasah. Kebijakan ini di masa lalu mengemukakan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh kehidupan yang baik serta pendidikan dan pendidikan yang baik, demikian pula lulusan Madrasah yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah umum pada jenjang yang sama seperti di atas. Siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah ke sekolah swasta yang sederajat. Informasi ini digunakan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah dan perguruan tinggi.

SKB juga menyatakan bahwa yang diartikan madrasah adalah lembaga akademik yang mengamalkan agama Islam sebagai konsep kunci yang memberikan minimal 30% lebih pada mata pelajaran umum, termasuk Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah. di tingkat sekolah menengah dan Madrasah Aliyah di tingkat sekolah menengah. SKB juga akan fokus pada hal-hal yang menjadikan Madrasah tempat yang lebih baik untuk belajar, antara lain: Sertifikasi Madrasah sama berharganya dengan universitas pada jenjang yang sama, lulusan Madrasah dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi, siswa di Madrasah dapat pindah ke sekolah negeri di level yang sama. Selain itu, kebijakan ini. 2 Tahun 1987 yang meliputi

kajian Islam dari masa bayi hingga pendidikan tinggi sebagai bagian dari program pendidikan nasional yang berhak atas kesetaraan di bidang hukum, bantuan keuangan dan sumber daya manusia. (Nata 2016).

Menurut SKB, beberapa kepala sekolah di Madrasah dapat memasuki sekolah menengah atas yang memiliki kampus, dan sebagai gantinya, siswa di Madrasah dapat mendaftar di program studi di luar kelas di bawah naungan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai sekarang.

B. PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya Kebijakan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)

Kebijakan publik atau public policy yang diambil pemerintah di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah. Kebijakan publik menurut hemat penulis adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. (Saifuddin 2016).

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Sebuah momentum kebijakan yang umumnya dianggap melegakan kalangan madrasah terjadi pada tahun 1975. Sebagai penjabaran dari Keppres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1973 dalam bentuk usaha peningkatan mutu madrasah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu Menteri Agama, menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing dengan nomor 6 tahun 1975, nomor 037/U/1975 dan nomor 36 tahun 1975. (Huda 2020). Inti dari SKB tersebut adalah agar secara lintas departemen dilakukan usaha bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah sehingga tingkat kualitas pengetahuan umum siswa madrasah bisa mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran siswa di sekolah umum yang sederajat. Dengan SKB 3 Menteri tersebut secara formal madrasah telah mengalami restrukturisasi, yaitu dari orientasi *tafaqquh fiddin* (pembelajaran agama) kepada orientasi ketenagakerjaan yang tidak berbeda dengan sekolah umum biasa. Dengan kata lain, madrasah bukan lagi tempat memberikan pendidikan

dan pengajaran, yang agama Islam menjadi pokok pengajarannya, melainkan sebagai “sekolah umum di bawah pengelolaan Departemen Agama.” Dengan kuantitas dan kualitas tenaga, sarana, prasarana, fasilitas, dan dana yang jauh lebih rendah dibanding sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan Nasional, madrasah bernasib hidup dan berkembang sebagai sekolah marjinal. Semua janji-janji penyediaan guru bidang studi umum, sarana, prasarana dan fasilitas termasuk alat-alat dan buku paket dari Departemen Pendidikan Nasional umumnya tidak terealisasi. Inilah sebuah “ironi pencerahan” yang dialami oleh madrasah. (Alrudiyansyah 2016).

Perubahan madrasah secara perlahan diawali pada akhir tahun 1987, Menteri Agama pada saat itu Munawir Sjadzali memprakarsai proyek penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Madrasah Aliyah ini didesain dengan kurikulum keagamaan yang padat serta penekanan pada penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Dan dibuka pertama kali pada lima daerah, yaitu : Ujung Pandang/Makassar, Jember, Yogyakarta, Ciamis, dan Padang Panjang, MAPK pada saat itu dinilai berhasil menyiapkan lulusan yang berwawasan ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan kemodernan yang baik. Kehadiran MAPK disambut masyarakat hingga keluar Keputusan Menteri Agama (KMA) No 371 tahun 1993 yang mengubah MAPK menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). (Umar 2016). Dengan keputusan ini, Kanwil Kementerian Agama (Depag waktu itu) diperbolehkan membuka MAK sesuai kebutuhan, tidak hanya negeri tetapi juga swasta. Jumlah MAK pun semakin banyak, namun disisi lain peningkatan kuantitas ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sehingga minat masyarakat juga berkurang. Disisi lain pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri dan Sumber Daya Manusia.

C. Visi-Misi dan Kurikulum MAPK

Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) diterapkan kurikulum yang padat agama dan dua bahasa asing (Arab dan Inggris) serta pembelajaran yang intensif dengan sistem asrama seperti pesantren. Dengan seleksi ketat dan pendanaan memadai (didukung proyek), MAPK dinilai telah berhasil menyiapkan lulusan kader ulama yang memiliki visi dan misi yang berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemodernan yang menawan. (Keagamaan, Surakarta, and Zulfa 2013) Program yang diusung MAPK adalah program *tafaqquh fi al-din* (pendalaman ilmu agama). MAPK adalah lembaga pendidikan formal non-pesantren yang berperan sebagai penyambung (setidaknya sebahagian dari) ‘tradisi pesantren’ yang tujuannya adalah untuk ber-*tafaqquh fiddin*, dengan trade mark dan unsur utamanya adalah mengkaji

kitab kuning. Secara substantif, hubungan MAPK dan *tafaqquh fiddin* bagaikan wadah dan isi, MAPK merupakan wadah sedangkan isinya adalah *tafaqquh fiddin*.

MAPK difokuskan untuk jurusan keilmuan Islam. Di kemudian hari, sekolah ini diubah nama menjadi MAKN, yaitu Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri. Sekolah yang sempat bertahan beberapa tahun ini awalnya didirikan untuk mencetak kader para ulama, dosen IAIN, Hakim Peradilan Agama dan pemangku-pemangku jabatan fungsional di bawah Departemen Agama pada waktu itu. Mungkin pembaca pernah mendengar nama Teuku Kemal Pasha, seorang antropolog muda dari Aceh yang sering muncul di televisi atau media. Atau membaca novel yang sangat mencerahkan berjudul “Anak-anak langit” karangan Mohamad Amin MS. Pembaca juga kenal salah satu anak muda yang sangat dinantikan analisisnya di Indoensia saat ini, seorang pengamat politik muda bernama Burhanuddin Muhtadi, atau anda pernah mendengar Habiburrahman el-sirazy, pengarang novel “Ayat-ayat Cinta” yang sangat terkenal. Ada lagi yang saat ini sedang naik daun, beberapa kali muncul dalam wawancara di studio televisi, Norhaidi Hasan jebolan Universitas Utrecht Belanda pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mulai juga dikenal publik seperti Asrorun Ni’am Sholeh, pernah menjadi wakil Ketua Komite perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, yang bersangkutan juga salah seorang dosen SPs UIN Jakarta. Atau jika anda sering mendengar radio (KBR) 68H dalam acara talkshow “Agama dan Masyarakat” yang diasuh Saidiman Ahmad.¹ Mereka ini adalah beberapa lulusan MAPK di seluruh Indonesia, Teuku Kemal Pasha misalnya adalah lulusan MAPK Aceh, Mohamad Amin MS adalah alumni MAPK Padang panjang, Sumatera Barat. Burhanudin Muhtadi dan Habiburrahman el-Sirazy adalah lulusan MAPK Surakarta solo, dan Norhaidi Hasan, orang Banjar yang lulusan dari MAPK Yogyakarta. Asrorun Ni’am Sholeh yang lulusan MAPK Jember. Dan Saidiman Ahmad adalah Alumni MAPK Makassar.

MAPK merupakan Madrasah setingkat Aliyah sebagaimana yang penulis jelaskan terdahulu dengan program dan pelajaran khusus yang berbeda dengan Madrasah Aliyah biasa, digagas dan pertama kali oleh menteri Agama Munawwir Sazali pada akhir tahun 1980-an, pada 1988 proyek MAPK/MAKN dimulai dan untuk tahap pertama, dibuka di lima lokasi; Padang Panjang, Ciamis, Yogyakarta, Ujung Pandang, dan Jember. Selanjutnya, MAPK ditambah di lima kota lagi, yaitu di Banda Aceh, Lampung, Solo, (Martapura) Banjarmasin, dan Mataram. Tidak seperti sekolah milik kementerian lainnya, seperti SMA Taruna atau

¹ “Sejarah Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Atau MAKN Dan Kegemilangan Para Aluminya ~ Pecinta Ilmu Dan Hikmah,” 1, accessed April 16, 2018, ISSN 2614-770X

pelayaran atau pertanian yang sangat terkenal dan eksis sampai sekarang, MAPK justru sangat asing. Maka dengan tidak banyaknya data dan informasi data serta tidak populer Madrasah ini di tengah-tengah Masyarakat, saya memberanikan diri untuk menyebutnya sebuah Proyek Rahasia Kementerian Agama. Walaupun bukan sekolah kedinasan Milik Kementerian agama, lulusannya dijanjikan dua hal, pertama bisa langsung menjadi pegawai negeri di kemenang atau kuliah di seluruh perguruan tinggi milik kementerian agama tanpa test masuk atau uang pendaftaran dan berhak memilih jurusan yang mereka inginkan.²

Apa yang berbeda dengan MAPK/MAKN ini? Menurut kabar berita, MAPK/MAKN merupakan proyek pretisius Munawwir Sazali,³ sebagai menteri Agama waktu itu. Dengan

² “MA Program Takhasus Penting Dihidupkan - Nasional Tempo.Co.”, accessed April 16, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/717109/ma-program-takhasus-penting-dihidupkan>. 1

³ Munawir Sjadzali adalah tipe seorang aktifis yang banyak berkiprah dalam beberapa organisasi, di antaranya: sebagai Ketua Angkatan Muda Gunungpati, Ketua Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Semarang. Munawir mencoba menelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik. Dengan memanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Kholil, yang penuh dengan kitab-kitab Islam klasik, Munawir berhasil menulis buku setebal 80 halaman dengan judul: “Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?.” Buku ini akhirnya dicetak sebanyak 500 copy dan habis terjual dalam kurun waktu empat bulan. Salah satu toko buku yang menjualkan buku tersebut adalah toko buku Tinta Mas yang terletak di Jalan Kramat Raya Jakarta. Kebetulan yang punya toko itu adalah Bapak Zein Zambek, ipar Bung Hatta, wakil presiden RI ketika itu. Malalui dia, buku tersebut sempat terbaca oleh Bung Hatta. Suatu hari ketika Munawir ke Jakarta, ia dipertemukan dengan Bung Hatta. Bung Hatta memuji atas keberaniannya berfikir mandiri dan meninggalkan klise yang usang. Atas jasa Bung Hatta inilah akhirnya Munawir kemudian diterima sebagai Pegawai Kementerian Luar Negeri, sebagai loncatan untuk dapat meneruskan pendidikannya di luar negeri. Dari tahun 1954-1983, Munawir menghabiskan waktu di luar negeri sebagai diplomat dan juga diisi dengan melanjutkan belajar. Ia belajar ilmu politik di Inggris pada Universitas of Exeter dengan lama belajar satu tahun yakni 1953-1954. Kemudian pada tahun 1956-1959, Munawir ditugaskan sebagai diplomat di Washintong DC. Disinilah ia melanjutkan lagi belajarnya pada jurusan Ilmu Politik di Universitas George Town. Selanjutnya Munawir diangkat menjadi Menteri Agama dalam kurun waktu dua periode 1983-1988 dan 1988-1993. Pada saat menjadi Menteri Agama ini, Munawir juga meneruskan ketertarikannya mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan mengajar di Pasca Sarjana IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta pada Mata Kuliah Islam dan Tata Negara. Sebagaimana yang dikatakan Tarmidji Taher bahwa Munawir tampak merasa feeling at home di lingkungan Departemen Agama ketimbang hari-hari panjangnya di Departemen Luar Negeri. Hal ini tampaknya karena selama di Departemen Agamalah Munawir merasa mendapat anugerah dari Allah Swt. yang tidak banyak orang memperolehnya, yaitu kemampuan menggabungkan tiga kecenderungan sekaligus yakni kepakaran dalam ilmu politik, kehandalan diplomatik dan keahlian dalam study Islam. Lebih-lebih kecenderungan yang ketiga ini mendapat saluran yang tepat di IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta. Selama menjabat sebagai Menteri Agama, banyak hal penting yang dilakukannya untuk kemashalatan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, di antaranya adalah (1) Pemasyarakatan Ketetapan MPR-RI No. IV tahun 1983 tentang Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi kehidupan masyarakat, (2) Melakukan pembenahan terhadap lembaga IAIN, Madrasah disamakan dengan Sekolah Umum yaitu MI disamakan dengan SD, MTsN disamakan dengan SMP, MAN disamakan dengan SMA, (3) Memprakarsai diadakannya pilot project Madrasah Aliyah Program Khusus MAPK dengan kurikulum bermuatan 70% pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum (4) Menghidupkan kembali program yang pernah dilakukan oleh Mukti Ali yang mengirim penyandang S1 untuk memperdalam ilmu pengetahuan di Barat (5) Ikut andil dalam penyelesaian pembahasan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirintis sejak tahun 1961. Pada hari Jum’at 23 Juli 2004 pukul 11.20 Wib., (pada umur 78 tahun) Munawir menghembuskan napas terkahirnya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Dari uraian singkat di atas dipahami bahwa upaya melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah merupakan agenda awal pemerintah (Menteri Agama) pada masa Orde Baru.

Lihat : “Artikel MAPK Munawir Sjadzali,” 1, accessed April 24, 2018, <http://hartorajih.blogspot.com/2014/12/makalah-mapk-munawir-sjadzali.html>.

cita-cita membentuk generasi baru untuk dipersiapkan menjadi pegawai kementerian agama yang lebih profesional dan berwawasan luas serta moderat agar mampu memahami perbedaan pemikiran keagamaan di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa mewarnai berbagai wacana perkembangan bangsa dan Negara.

MAPK pun di bentuk dengan keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987, siswa MAPK di beri banyak fasilitas seperti asrama dan perpustakaan kitab Kuning, para siswanya diberi uang saku yang pada saat itu dirasa sangat besar, namun semua fasilitas tersebut juga berbanding lurus dengan progam belajar yang sangat padat dan melelahkan. Tiap Madrasah ini setiap tahun hanya menerima 35-40 siswa, semuanya adalah siswa laki-laki, kecuali di Ciamis dan Padang Panjang dan Surakarta Solo yang menyediakan kelas khusus perempuan. Calon siswa di jaring melalui seleksi yang sangat ketat, siswa diambil dari madrasah tsanawiyah atau pesantren modern. Dengan mata pelajaran Agama 70% dan pejaran umum 30% menjadikan madrasah ini sangat fokus terhadap pembentukan intelektual keagamaan. Tidak ada hari libur bagi siswa Madrasah ini, kegiatan di mulai dari waktu subuh dan di akhiri pada pukul sepuluh malam, ketika siang hari mereka mengikuti pelajaran agama biasa dengan buku-buku berbahasa arab gundul, kemudian sehabis ashar di lanjutkan dengan tutorial sore dengan mata pelajaran kitab-kitab kuning, setelah itu kegiatan malam dari waktu magrib sampai sehabis isya dan dilanjut tutur dari jam setengah sembilan malam sampai jam sepuluh malam, begitu setiap hari kecuali minggu siang, namun minggu siang pun biasanya di isi dengan berbagai kegiatan. Madrasah ini menggunakan tradisi disiplin yang ketat. Sekolah ini sering juga disebut dengan nama Pesantren Negeri, karena memang mata pelajaran dan kehidupan mereka di Madrasah yang berasrama sangat mirip dengan pelajaran pesantren, dengan kitab-kitab berbahasa Arab gundul. Para siswa MAPK ditempatkan di asrama yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Setiap bulan, para siswa ini menerima uang saku sebesar Rp. 17.500, angka yang cukup besar di awal tahun 1990, tapi sudah tidak bernilai di pasca Krisis Moneter tahun 1997. (sepertinya, pemberian uang saku ini sudah tidak ada lagi saat itu). Alumni madrasah ini di seluruh Indonesia diperkirakan tidak sampai lima ribu orang, dengan diaspora pendidikan yang sangat luas baik di dalam maupun diluar negeri. ratusan orang dari mereka mengambil kuliah di Timur Tengah, banyak dari mereka juga yang mengambil Master dan Doktor di Eropa, Amerika maupun Australia.

Salah satu data misalnya, seperti alumni MAPK Martapura kalimantan selatan yang diperkirakan hanya sekitar 500 orang, tapi ratusan orang dari mereka bergelar S2 dan puluhan

orang sudah bergelar doktor atau sedang mengambil studi doktor, alumni madrasah ini adalah satu-satunya sekolah yang berhasil menghasilkan doktor dan calon doktor didalam dan luar negeri hampir puluhan orang dengan rata-rata dibawah umur 35 tahun diseluruh kalimantan. Saat ini pencapaian gelar S3 ini terus bertambah. Hal seperti ini juga terjadi di seluruh MAPK se Indonesia.

MAPK merupakan proyek Kementerian Agama yang sangat berhasil dalam membentuk generasi baru dunia intelektual sosial keagamaan di negeri ini, sayangnya MAPK telah dihapuskan secara resmi oleh Kementerian Agama beberapa tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas, yang dapat bertahan sampai saat ini adalah MAPK Surakarta Solo. Para alumni MAPK pun masih sering mengadakan reuni, meski masih dalam Skala sekolah masing-masing, meski sebenarnya akan sangat bagus jika ada satu organisasi untuk menaungi seluruh ikatan alumni MAPK seluruh Indonesia. Seperti dikemukakan diatas, MAPK memang sangat asing di telinga banyak orang, dan hal ini juga diperparah dengan dengan jaringan alumni mereka yang juga sangat dingin dan tidak agresif. Konsolidasi antar merekapun sangat lemah.⁴

D. Alternatif Strategi MAPK Ke Depan

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam akan merevitalisasi keberadaan madrasah Aliyah Negeri Program Khusus atau yang selama ini dikenal sebagai MAPK. Kepastian revitalisasi MAPK ini diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Madrasah. Nur Kholis Setiawan. MAPK yang ada akan kita revitalisasi,” tegas M Nur Kholis Setiawan. Ditegaskan pria yang juga tercatat sebagai Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, Program revitalisasi ini merupakan implementasi dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013.⁵

Dalam perubahan tersebut, ditetapkan tentang penganekaragaman madrasah menjadi tiga tipologi, yaitu: akademik, keterampilan/kejuruan, dan keagamaan. “Revitalisasi ini menjadi upaya dan kontribusi Kemenag dalam mengatasi langkanya kader ulama. Ditpenma mengambil peran aktif dalam menyiapkan kader ulama sejak jenjang pendidikan menengah. Munculnya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga tidak mengatur secara jelas tentang apa, bagaimana, dan di mana status hukum dan legalitas MAK. Ditjen

⁴ “Sejarah Madrasah Aliyah Program Khusus [MAPK] Atau MAKN Dan Kegemilangan Para Alumninya ~ Pecinta Ilmu Dan Hikmah,” 1.

⁵ “Alhamdulillah, Tahun Ini, Kemenag Revitalisasi Madrasah Aliyah Program Khusus,” *Tribun Timur*, 1, accessed April 22, 2018, <http://makassar.tribunnews.com/2016/02/25/alhamdulillah-tahun-ini-kemenag-revitalisasi-madrasah-aliyah-program-khusus>.

Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran yang mengatur bahwa mulai tahun 2007 MAPK tidak lagi diizinkan menerima siswa baru. Namun demikian, menurut M Nur Kholis mengatakan bahwa proses revitalisasinya bukan berarti mengembalikan MANPK di era awal. Proses revitalisasi dilakukan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada. Modelnya tidak akan sama persis dengan MANPK di tahun 87-an atau 90-an. “Bentuk revitalisasinya adalah melalui penguatan kurikulum asramanya. Aspek *tafaqquh fiddinnya* ada di asrama. Jadi hampir mirip dengan pesantren,” terang M. Nur Kholis Setiawan. misalnya di Madrasah Aliyah peminatan keagamaan ada mata pelajaran Tafsir, maka pendalaman mata pelajaran Tafsir itu dilakukan di asrama dengan, misalnya tambahan kajian terhadap kitab-kitab Tafsir. Begitu juga dengan Fiqih-Usul Fiqih dan Hadis-Ilmu Hadis,” tambahnya. Revitalisasi MAN PK tahun ini menurut M Nur Kholis akan dilaksanakan di 10 madrasah, antara lain di Jember, Jombang, Surakarta, Jogjakarta, Ciamis, dan Padang Panjang.⁶ Madrasah-madrasah yang kami sebutkan di atas sekarang lagi mencoba untuk eksis kembali sebagaimana yang pernah terjadi puluhan tahun sebelumnya yang banyak mencetak kader-kader yang mumpuni di berbagai bidang.

Untuk melihat prospek pendidikan agama Islam kedepan ada baiknya kita membaca pendapatnya Sayyid Hosein Nasr dalam bukunya *Islam and Challenge of The 21 Century*, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, mengemukakan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada abad 21 yaitu : 1), Krisis lingkungan, 2) tatanan Global, 3). Post Moderisme, 4) sekularisasi kehidupan, 5) krisis ilmu pengetahuan dan teknologi, 6) penetrasi nilai-nilai non-Islam, 7) citra Islam, 8) sikap terhadap peradaban lain, 9). Feminisme, 10) Hak Asasi Manusia, 11) tantangan internal.(Muhaimin 2014). Itulah yang menjadi tantangan yang cukup beragam untuk seluruh umat Islam secara universal, demikian juga yang terjadi di Indonesia beberapa dekade terakhir berdasarkan hasil penelitian di berbagai daerah yang dilakukan oleh : Murtadho, dan kemudian hasil penelitiannya didiskusikan dengan beberapa pihak, dirumuskan beberapa alternatif format penyelenggaraan MAPK ke depan sebagai langkah untuk mempertahankan dan mewujudkan cita-cita luhur melahirkan agamawan yang intelek dan intelektual yang agamis.⁷ Beberapa format itu antara lain:

⁶Tribun Timur. Com “Alhamdulillah, Tahun Ini, Kemenag Revitalisasi Madrasah Aliyah Program Khusus,” 2.

⁷Murtadho, Peneliti Badan Litbang Depag RI, Studi S3 Antropologi UI Depok, Indonesia “*Eksistensi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)*,” 7.

1. MAPK sebagai Lembaga Mandiri

Sebagai program *tafaqquh fid-din*, MAPK dijadikan lokus bagi muncul dan berkembangnya kader ulama yang mumpuni dan memiliki akses pendidikan, sosial, dan politik yang lebih baik. MAK diupayakan menjadi lembaga pendidikan tersendiri (baca: mandiri) yang berorientasi pada terciptanya “ahli ilmu agama” yang sekaligus menjadi input dominan bagi program agama, baik di UIN/IAIN/STAIN maupun universitas agama di luar negeri.

Program *tafaqquh fid-din* idealnya diselenggarakan mulai tingkat menengah atas yakni pada MAK ini, bukan pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama. Sebab, jenjang sekolah dasar dan menengah pertama diupayakan untuk memberi kesempatan bagi terciptanya warga belajar yang memiliki kecakapan-kecakapan pendidikan dasar. Dengan demikian, MAPK merupakan jenjang pendidikan yang sangat strategis bagi pembinaan program *tafaqquh fid-din*.

Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan secara eksplisit bahwa di antara jenis pendidikan adalah kejuruan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, *tafaqquh fid-din* bagi MAPK merupakan kejuruan “ahli ilmu agama”. Sebab, hingga saat ini masih sangat minim, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali, MA yang memiliki kejuruan tersendiri.

Konsekwensi atas tawaran ini adalah diperlukannya pengakuan MAPK sebagai nomenklatur atau unit pelaksana teknis (UPT) tersendiri. Dengan demikian, struktur dan tata kelola organisasi MAK berdiri sendiri, terpisah dari lembaga lainnya termasuk dari MA.

2. MAPK sebagai Program Studi/Jurusan

Alternatif kedua, adalah MAPK dimasukkan sebagai pilihan ilmu agama pada MA reguler, seperti halnya pilihan atau jurusan lainnya. Artinya, MAK semacam ini tidak lagi memiliki tata organisasi dan struktur tersendiri, tetapi sudah melebur menjadi salah satu pilihan jurusan pada MA reguler, seperti IPA, IPS, dan Bahasa.

Alternatif ini memang mempunyai kelemahan. Berdasarkan pengalaman pada masa lalu, sebelum MAPK didirikan tahun 1987, jurusan agama di MA/MAN Belum menghasilkan output yang menggembirakan. Ini pula yang menjadi alasan utama, kenapa MAPK dilahirkan. Salah satu penyebab umum ketidakberhasilan program agama di MA reguler adalah keterbatasan guru agama yang berkualitas di MA reguler. Ada dugaan bahwa guru agama di

MA masih didominasi sarjana IAIN yang bahasa arabnya lemah dan tidak mempunyai kemampuan membaca kitab kuning.

3. MAPK sebagai Jenis Pendidikan Keagamaan

Alternatif ketiga, adalah MAK dijadikan salah satu jenis pendidikan keagamaan semacam madrasah diniyah tingkat *ulya* (diniyah tingkat menengah atas). Dalam UU nomor 20/2003 pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Selanjutnya, dalam ayat (4) disebutkan bahwa di antara bentuk pendidikan keagamaan dalam Islam adalah pendidikan diniyah.

Dalam konteks ini, MAPK dapat diselenggarakan sebagai pendidikan diniyah yang mengembangkan kecakapan “ahli agama” yang disediakan bagi siswa yang ada pada MA. Dengan kata lain, pada pagi hari siswa melaksanakan program reguler sesuai dengan program MA yang diikuti, tetapi setelah jam sekolah, sore atau malam hari, siswa mengikuti pendidikan diniyah ini. Dengan demikian, siswa yang mengikuti program MAPK model ini setelah lulus memiliki kemampuan dan keahlian ilmu agama yang memadai. Jika siswa MA program ilmu agama yang mengikuti MAPK model ini maka akan menjadi input UIN/IAIN/STAIN program agama atau universitas luar negeri program agama. Sedangkan siswa MA program umum yang mengikuti MAK model ini akan menjadi ahli pengetahuan umum yang memahami ilmu agama dengan sangat baik.

4. MAK Mandiri dan MAK Program Studi/Jurusan (Berjalan Beriringan)

Salah satu rumusan mengusulkan agar MAK dengan format yang telah ada tetap dipertahankan, di samping dikembangkan MAK dalam bentuk program studi/jurusan di MA reguler. Namun perlu disadari sepenuhnya, bahwa alternatif ini akan menghasilkan output yang berbeda kualitasnya. Pada MAK yang mandiri, karena fokus pada usaha *tafaquh fid din* maka outputnya akan lebih baik.

Pilihan ini dibuat, karena berdasarkan wawancara dengan para penyelenggara MAK di lapangan, kebanyakan mereka berharap agar alumni MAK tetap berijazah sama dengan lulusan MA reguler. Mereka masih keberatan kalau lulusan MAK hanya mendapatkan ijazah persamaan sebagaimana tanda bukti lulus program kejar Paket C. (Akhwan 2008).

E. KESIMPULAN

Pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa MAPK merupakan sebuah proyek prstius yang dilakukan oleh Munawir Sjadzali bahwa pendidikan di Indonesia harus

diupayakan dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan untuk menghasilkan sebuah lulusan yang bisa diandalkan dari segi keilmuan keagamaan, dan keislaman yang sangat berkompeten, demikian juga mumpuni dibidang dua bahasa yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris, Seleksinya harus ketat diawali dengan mulai dari pendaftaran sampai dengan terakhir, namun berbagai kepentingan yang ada di dalam program ini pada saat itu, Menteri agama sesudahnya tidak melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Munawir sjadzali, sehingga program pristius ini pada akhirnya tidak berjalan sesuai dengan harapan pada saat dirintis, Program revitalisasi MAPK sudah dilaksanakan pada saat ini semoga akan menjadi harapan formulasi pendidikan keagamaan untuk masa depan pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi.

Semoga dengan jurnal singkat ini dapat menambah khasanah wawasan keilmuan kita tentang MAPK, untuk masa depan Madrasah di Indonesia baik dari segi kebijakan dan kewenangan bagi setiap lulusan keagamaan secara terus menerus berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhwan, Muzhoffar. 2008. "Pengembangan Madrasah Sebagai Pendidikan Untuk Semua." *el-Tarbawi* 1(1): 41–54.
- Alrudiyansyah. 2016. "Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru." *Nur El-Islam* 3(1): 50–62.
- Andriani, Asna. 2016. "Munculnya Lembaga Pendidikan Islam." *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman* 7(2): 285–98.
- Dute, Hasruddin. 2019. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Di Sekolah Umum Pra Kemerdekaan Dan Pasca Kemerdekaan. 309." 3(1): 309–31.
- Huda, Miftahul. 2020. "Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Journal of Islamic Education Research* 1(02): 39–53.
- Keagamaan, Program, M A N Surakarta, and Norma Chunnah Zulfa. 2013. "Manajemen Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan – Norma Chunnah Zulfa, Pardjono 219." 1: 219–34.
- Muhaimin. 2014. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nata, Abuddin. 2016. "Sejarah Pendidikan Islam." *Kencana*.
- Saifuddin, Ahmad. 2016. "Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3(1): 207.
- ISSN 2614-770X Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 4 No. 2. Desember 2020.

Umar. 2016. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Transformatif*. Jakarta: Deepublish.